

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang mendukung penelitian ini. Tinjauan pustaka dalam bab ini meliputi beberapa penjelasan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Serta pada bagian ini juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu atau studi terkait.

2.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Desentralisasi fiskal atau kemandirian keuangan daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengambil keputusan dan pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut selanjutnya dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat yang bersangkutan (Boex, 2001: 13).

Desentralisasi secara teoritis mempunyai tujuan untuk menciptakan pemerintah yang efektif dan efisien, membangun demokrasi lokal serta menghargai keragaman lokal yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan masyarakat. Dalam memaksimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat ini pemerintah daerah perlu biaya guna membiayai pengeluaran publik seperti pendidikan, kesehatan melalui penerimaan daerahnya, sehingga pengeluaran

publik suatu daerah sangat erat kaitannya dengan penerimaan daerah tersebut yang berasal dari PAD, dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain.

Pengeluaran sektor publik berkaitan dengan pembangunan manusia. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu indikator dalam pembangunan manusia.

Anggaran dalam pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga akan meningkatkan angka melek huruf. Anggaran dalam bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi riil per kapita (Delavallade, 2006).

Kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal atau mengatur kemandirian keuangannya sendiri dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah tersebut. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007:231).

2.1.1 PAD Sebagai Indikator Kemandirian Keuangan Daerah

PAD merupakan semua penerimaan keuangan daerah, penerimaan ini bersumber dari pajak retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain. Peranan PAD dalam hal ini sangat menentukan kemandirian keuangan daerah. PAD sendiri

dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemandirian suatu daerah kepada pemerintah pusat dalam kaitannya pelaksanaan otonomi daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dengan terciptanya kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah akan mampu membiayai pembangunan daerahnya.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Selama beberapa dasa warsa yang lalu titik perhatian utama ekonomi dunia ditunjukkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan ekonomi riil. Para ekonom beranggapan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional riil tersebut bisa digunakan sebagai ukuran kinerja perekonomian suatu negara (Lincoln Arsyad, 1997).

Secara singkat pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya berada pada tiga aspek, yaitu: proses, output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total (GDP) dan sisi sisi jumlah penduduk (Boediono, 1982).

2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal akan terjadi jika ada proporsi tertentu dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Dalam akumulasi modal ini mencakup beberapa investasi, antara lain: investasi langsung, investasi tidak langsung, investasi sumberdaya manusia. Semua jenis investasi di atas menyebabkan terjadinya akumulasi modal. Akumulasi modal akan menambah sumberdaya-sumberdaya yang ada.

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja.

3. Kemajuan Teknologi

Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ada 3 macam klasifikasi kemajuan teknologi, yaitu: netral, hemat tenaga kerja, hemat modal. Dalam hubungannya dengan analisis kemungkinan produksi (PPC), kemajuan teknologi yang bersifat netral adalah penduakalian output total adalah sama dengan menduakalikan semua input produktif. Dilain pihak, kemajuan teknologi bisa bersifat hemat tenaga kerja atau hemat modal, yaitu tingkat

output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.

2.2.2 PDRB Sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia).

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDRB. Beberapa definisi kunci mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai berikut (BPS, 2012):

- **Produk Domestik**

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan.

- **Wilayah Domestik dan Regional**

Pengertian domestik/regional dapat mencakup provinsi atau daerah kabupaten/kota. Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah

transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).

- **Produk Regional**

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki residen.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup (BPS). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Upaya yang paling ambisius dan terbaru dalam menganalisis perbandingan status pembangunan sosial baik di NSB maupun negara maju telah dilakukan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) secara sistematis dan komprehensif. Amartya Sen, guru besar ekonomi dan filsafat dari Universitas Harvard, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses ekspansi dan kebebasan positif yang dinikmati oleh masyarakat (Kuncoro, 2013).

UNDP menerbitkan seri tahunan dalam publikasi berjudul *Human Development Report*. Yang menarik dari laporan ini, yang diterbitkan sejak tahun 1990 adalah penyusunan dan perbandingan HDI. HDI mencoba menyusun peringkat semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia terendah) hingga 1 (pembangunan manusia yang tertinggi). Peringkat diatas disusun berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu:

- 1) Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup
- 2) Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga).
- 3) Penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara.

2.3.1 Rumus Menghitung IPM

HDI dapat dihitung dengan persamaan berikut (UNSFIRS,2000):

$$-$$

di mana:

X(1) = Indeks harapan hidup kelahiran

X(2) = Indeks Pendidikan

X(3) = Indeks standar hidup layak.

Kisaran antara nilai minimum dan maksimum untuk indikator yang tercakup sebagai komponen HDI adalah (UNSFIRS, 2000):

- Harapan hidup kelahiran : 25-28 (Standar UNDP)
- Tingkat melek huruf : 0-100 (Standar UNDP)
- Rata-rata lama sekolah : 0-15 (Standar UNDP)
- Konsumsi per kapita yang disesuaikan : 300.000-732.720.

2.4 Studi Terkait

Dewi dan Sutrisna (2014) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali menyebutkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian tersebut menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Teknik analisis yang digunakan adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah dan regresi linier berganda. Variabel kemandirian keuangan daerah didapatkan dengan cara membandingkan antara PAD dengan total pengeluaran daerah. Semakin besar rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin mandiri pula suatu daerah tersebut. Tingkat kemandirian fiskal minim karena adanya peningkatan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan di daerah sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik terjamin (Sriyana, 2011).

Mirza (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan *time seroes* dan *cross section*. Data yang diteliti meliputi, pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja modal, dan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 200-2009 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,49.

Amalia dan Purbadharmaja (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan hasil bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK), dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan obyek penelitiannya adalah kemandirian keuangan daerah, keserasian alokasi belanja dan indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali pada periode 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja serta regresi linier berganda.

Variabel kemandirian keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan PAD dengan total pengeluaran daerah. Variabel keserasian alokasi belanja diperoleh dengan membandingkan belanja publik dengan total pengeluaran daerah, dimana belanja publik yang dimaksud adalah belanja yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening menunjukkan hasil sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- 2) Dana Alokasi Umum terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- 3) Dana Alokasi Khusus terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- 4) Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- 5) Pengalokasian Anggaran Belanja Modal yang diprosikan dengan Belanja Modal terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Dari seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa pemerintah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Variabel dependen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah.

